



PENGADILAN NEGERI REMBANG
KELAS I
P. Diponegoro No. 97 Rembang 5921
Telp. (0293) 691234 Jawa Tengah



**LAPORAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI REMBANG
TAHUN 2022**

PENGANTAR

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran tentang kinerja Pengadilan Negeri Rembang Kelas II, dan merupakan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap apa (*what*) dan bagaimana (*how*) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta program kerja baik di bidang teknis yudisial (Kepaniteraan) sebagai layanan utama maupun bidang teknis administrasi (Keseekretariatan) sebagai layanan pendukung (*Supporting Unit*).

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini berpedoman pada format sebagaimana dimaksud dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 2876/SEK/OT 01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 31 Desember 2022

The image shows the official seal of the Rembang District Court (Pengadilan Negeri Rembang) on the left, which is circular with a central emblem and the text 'PENGADILAN NEGERI REMBANG' around the perimeter. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink.

M. BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S. H.,M.H.
NIP. 197703112002121001

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A.Kebijakan Umum Peradilan	1
B.Visi dan Misi	2
Bab II Keadaan Perkara	3
A. Keadaan Perkara	3
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	3
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	5
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	6
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	7
B. Penyelesaian Perkara	8
- Jumlah sisa perkara yang diputus	8
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	9
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	9
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	11
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	12
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	12
- Posbakum.....	12
- Sidang Keliling/Pelayanan terpadu	13
- Perkara Prodeo.....	13
Bab III Sumber Daya Manusia	14
A. Komposisi SDM berdasarkan kepegangatan/golongan/pendidikan	14
- Mutasi	18
- Promosi	19
- Pensiun	20
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	20
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi 28	
A. Pengelolaan Keuangan	28
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	29
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	34
- Implementasi e-court.....	34
- Implementasi SIPP.....	35
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik	37
- Akreditasi Penjaminan Mutu	37
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	38
- Inovasi Pelayanan Publik.....	39
Bab VI Pengawasan	41

A Internal	41
A. Evaluasi	42
Bab VII Penutup.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Rekomendasi	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Dalam melaksanakan kebijakan umum Peradilan tidak terlepas dari Program kerja dan Pencapaian Target yang menyangkut materi penyusunan Program Kerja baik itu Visi, Misi, Strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi dalam merumuskan kebijakan Umum Peradilan yang merupakan kinerja Pelayanan publik. Telah merumuskan:

- Perencanaan.
- Pengorganisasian.
- Pelaksanaan.
- Pengawasan.
- Masing-masing penanggung jawab tugas telah melaksanakan uraian tugasnya serta mengawasi pelaksanaan program kerja dengan baik.

Sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Rembang Kelas II, kami telah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Semarang, antara lain :

- Melaksanakan Pengawasan melekat, untuk membina para Hakim, ASN sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7,8,9 Tahun 2016 dan PPNPN sesuai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 811/SEK/SK/VIII/2021.
- Melaksanakan rapat kerja dengan para hakim dan rapat IKAHI.
- Melaksanakan rapat kerja dengan para Pejabat Struktural dan Fungsional.
- Melaksanakan pemeriksaan mendadak, melakukan pemeriksaan Kas Keuangan.

- Bendaharawan, memeriksa ruangan kerja, register surat-surat masuk maupun keluar, Kebersihan /Kerapian/Ketertiban Bekerja.
- Melaksanakan dan berperan aktif dalam rapat para Penegak Hukum (Gakkum).
- Adanya kerjasama yang baik, dan saling menghormati antara para anggota Forkopimda.

Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut kami menggunakan dasar saling asah, saling asih dan saling asuh.

B. Visi dan Misi

Sesuai dengan Petunjuk Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dilandasi dengan Visi dan Misi yang diembannya, yaitu:

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Rembang yang Agung”

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rembang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Rembang.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rembang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Rembang

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara

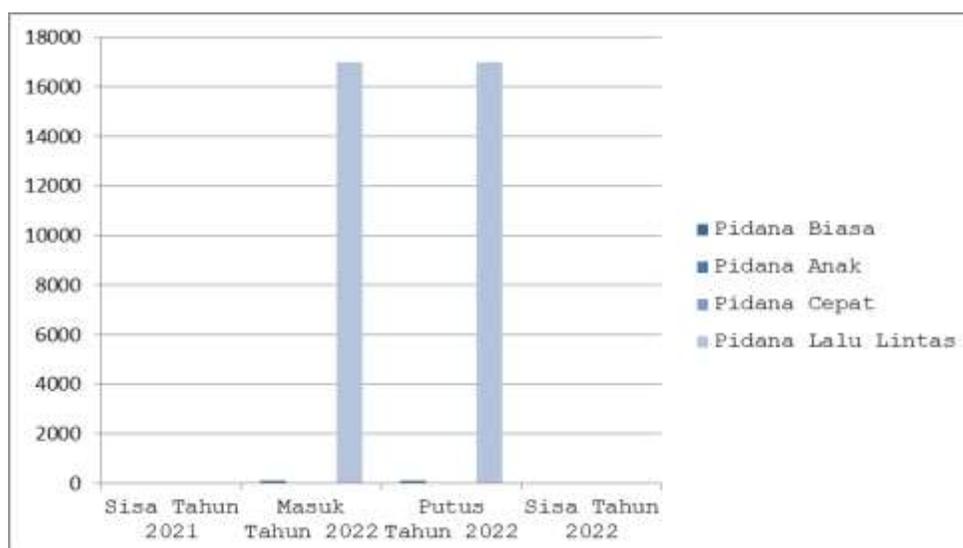
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Rembang adalah Pengadilan yang bertugas memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata di tingkat pertama. Perkara pidana terdiri dari perkara pidana biasa, perkara pidana anak, perkara pidana singkat, perkara pidana cepat dan perkara pidana lalu lintas. Sementara perkara perdata terdiri dari gugatan, gugatan sederhana, permohonan serta perlawanan/bantahan. Keadaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Rembang selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Rembang
Per 31 Desember 2022**

No.	Uraian	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022	Ket
1.	Pidana Biasa	19	115	118	16	-
2.	Pidana Anak	1	4	5	-	-
3.	Pidana Cepat	0	1	1	0	-
4.	Pidana Lalu Lintas	0	16988	16988	0	-

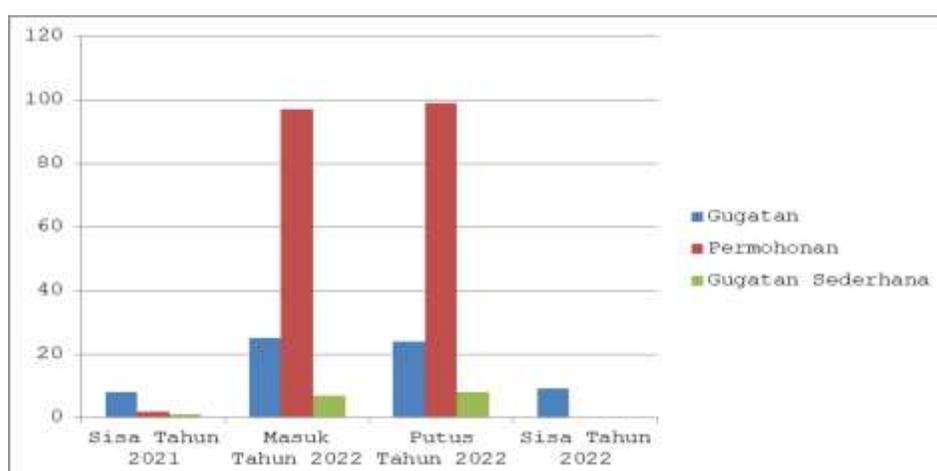
Grafik keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Rembang :



Keadaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Rembang selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022	Ket
1.	Gugatan	8	25	24	9	-
2.	Permohonan	2	97	99	-	-
3.	Gugatan Sederhana	1	7	8	-	-

Grafik keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Rembang :

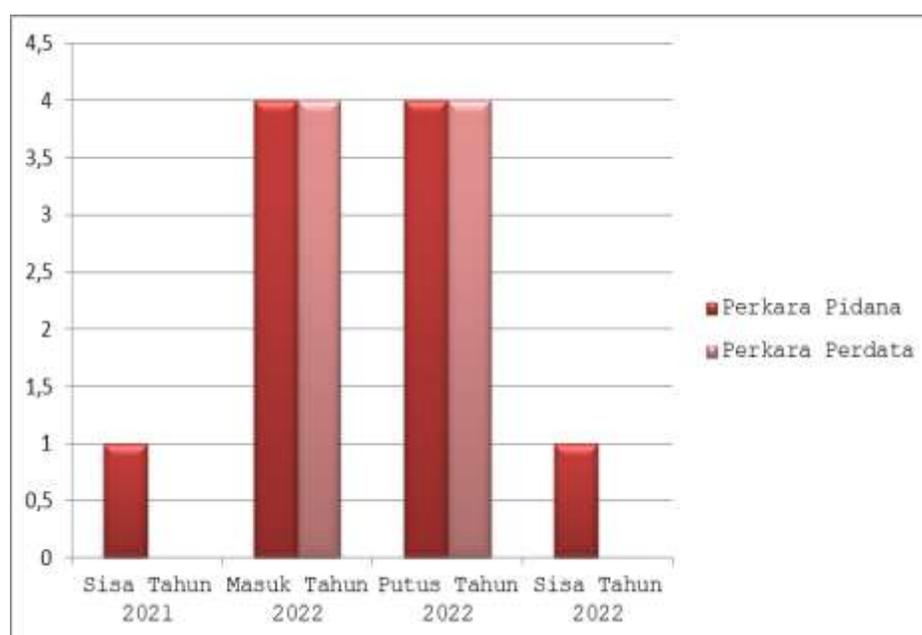


2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Untuk perkara yang diputus Pengadilan Negeri Rembang dan dimohonkan Banding selama tahun 2022 dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022	Ket
1.	Perkara pidana yang dimohonkan Banding	1	4	4	1	-
2.	Perkara perdata yang dimohonkan Banding	0	4	4	0	-

Grafik keadaan perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Negeri Rembang :

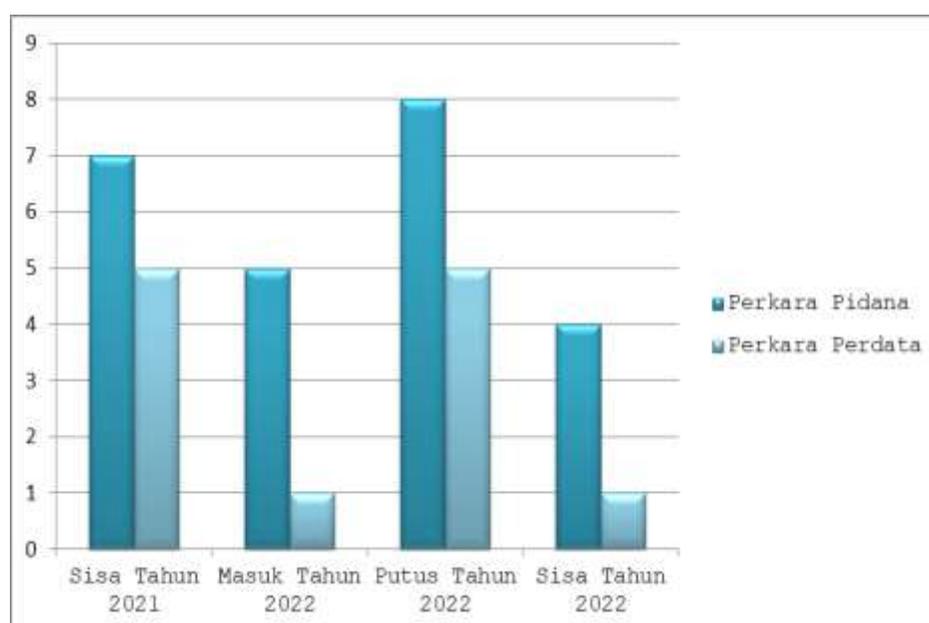


3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Untuk perkara yang diputus Pengadilan Negeri Rembang kemudian dimohonkan Kasasi selama tahun 2022 dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

No.	Uraian	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022	Ket
1.	Perkara pidana yang dimohonkan Kasasi	7	5	8	4	-
2.	Perkara perdata yang dimohonkan Kasasi	5	1	5	1	-

Grafik keadaan perkara yang dimohonkan kasasi pada Pengadilan Negeri Rembang :

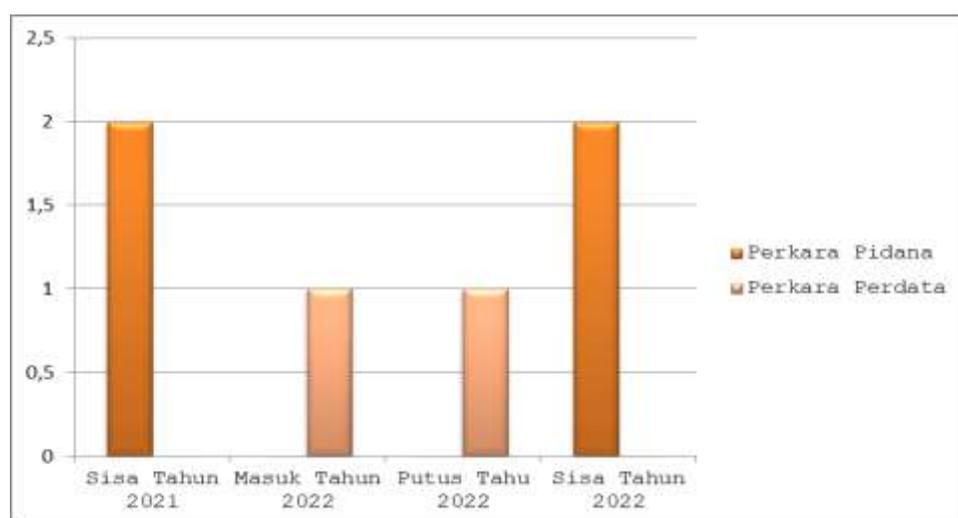


4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Untuk perkara yang diputus Pengadilan Negeri Rembang kemudian dimohonkan Peninjauan Kembali dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Uraian	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022	Ket
1.	Perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali	2	0	0	2	-
2.	Perkara perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali	0	1	1	0	-

Grafik keadaan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Rembang :



B. Penyelesaian Perkara

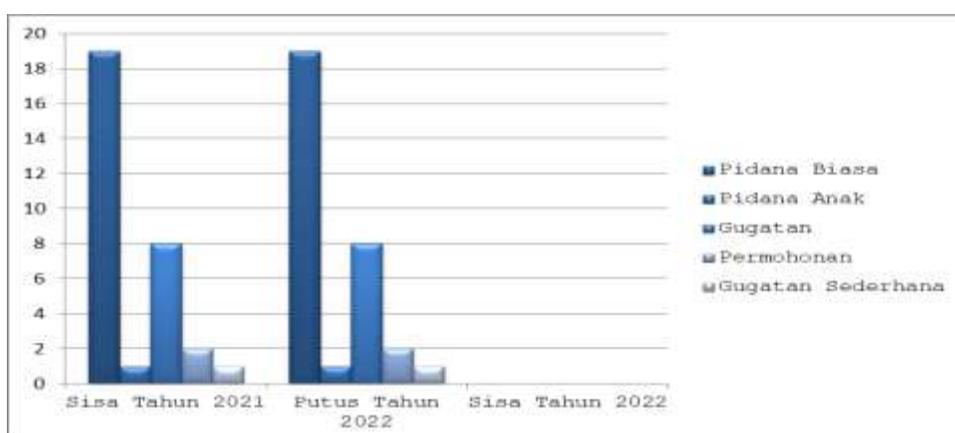
Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Rembang dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini :

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk	Putus	Sisa Tahun 2022
1.	Pidana Biasa	19	115	118	16
2.	Pidana Anak	1	4	5	-
3.	Pidana Cepat	-	1	1	-
4.	Pidana Lalu Lintas	-	16988	16988	-
5.	Gugatan	8	25	24	9
6.	Permohonan	2	97	99	-
7.	Gugatan Sederhana	1	7	8	-

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

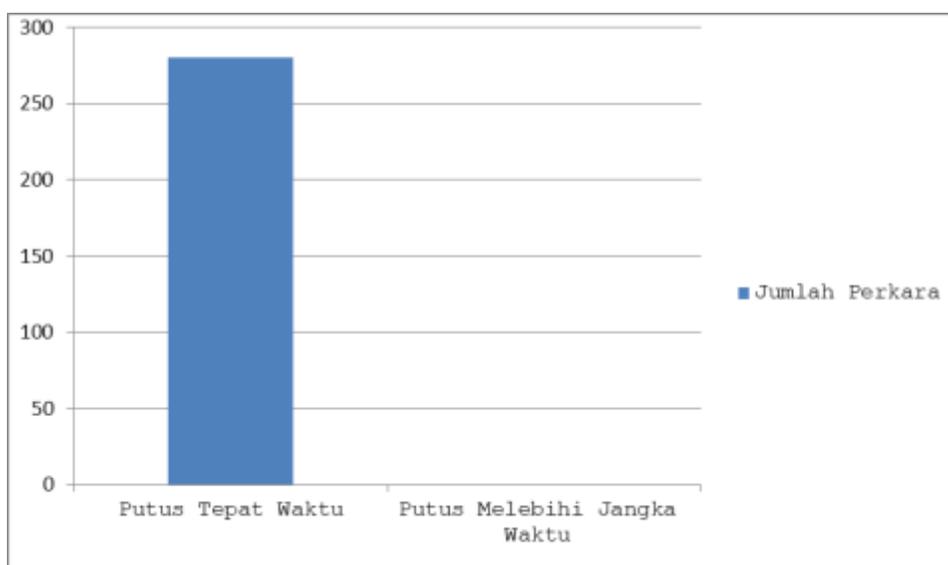
Pada Pengadilan Negeri Rembang tahun 2021 terdapat 31 perkara yang belum diputus dan harus diselesaikan proses pemeriksaannya pada tahun 2022, yaitu 19 perkara pidana biasa, 1 perkara pidana anak, 8 perkara gugatan, 2 perkara permohonan dan 1 perkara gugatan sederhana. Dan selama tahun 2022, sebanyak 31 sisa perkara tersebut dapat diselesaikan.

Grafik sisa perkara tahun 2021 yang diputus tahun 2022 :



2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Jumlah perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Rembang tahun 2022 sejumlah 280 perkara, terdiri dari 134 perkara Pidana Biasa, 5 perkara Pidana Anak, 1 perkara Pidana Cepat, 33 perkara Gugatan, 99 perkara Permohonan dan 8 perkara Gugatan Sederhana, baik sisa perkara tahun 2021 maupun perkara yang masuk tahun 2022. Dari 280 perkara tersebut 280 diputus tepat waktu dan 0 perkara diputus melebihi jangka waktu penyelesaian perkara.

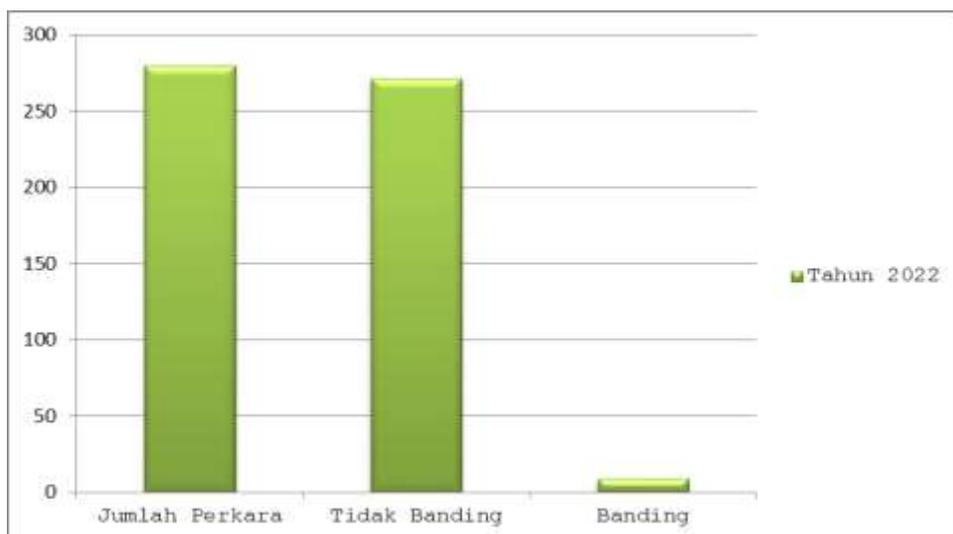


3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

a. Jumlah Perkara yang tidak upaya hukum banding

Uraian	Tahun 2022
Jumlah Perkara	280
Tidak Banding	271
Banding	9

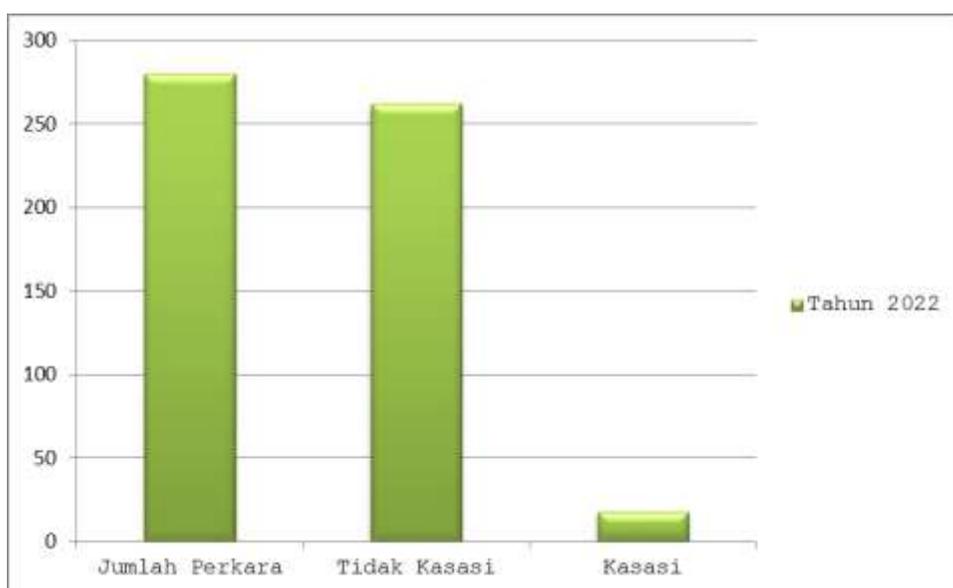
Grafik keadaan perkara yang tidak upaya hukum banding :



b. Jumlah Perkara yang tidak upaya hukum kasasi

Uraian	Tahun 2022
Jumlah Perkara	280
Tidak Kasasi	262
Kasasi	18

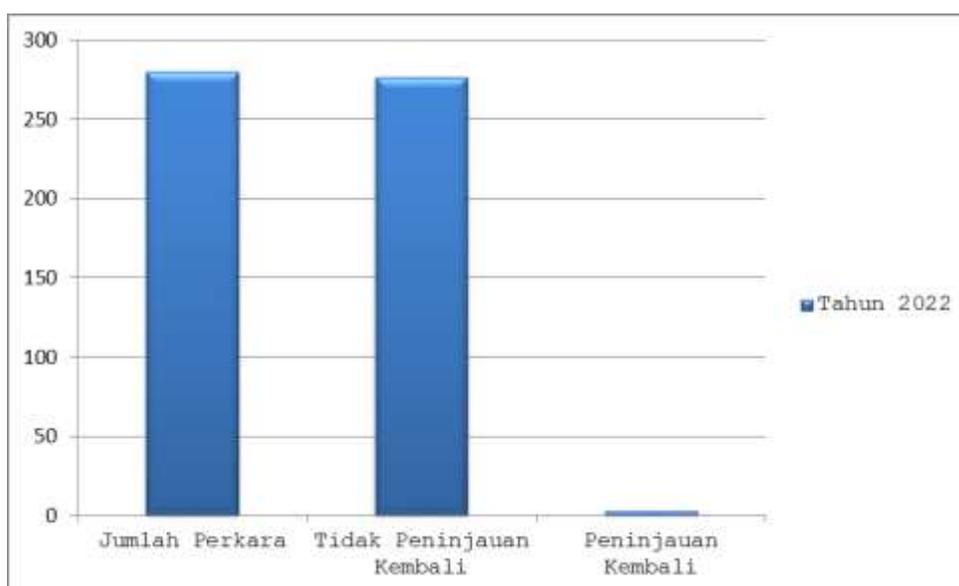
Grafik keadaan perkara yang tidak upaya hukum kasasi :



c. Jumlah Perkara yang tidak upaya hukum Peninjauan Kembali

Uraian	Tahun 2022
Jumlah Perkara	280
Tidak Peninjauan Kembali	277
Peninjauan Kembali	3

Grafik keadaan perkara yang tidak upaya hukum peninjauan kembali :

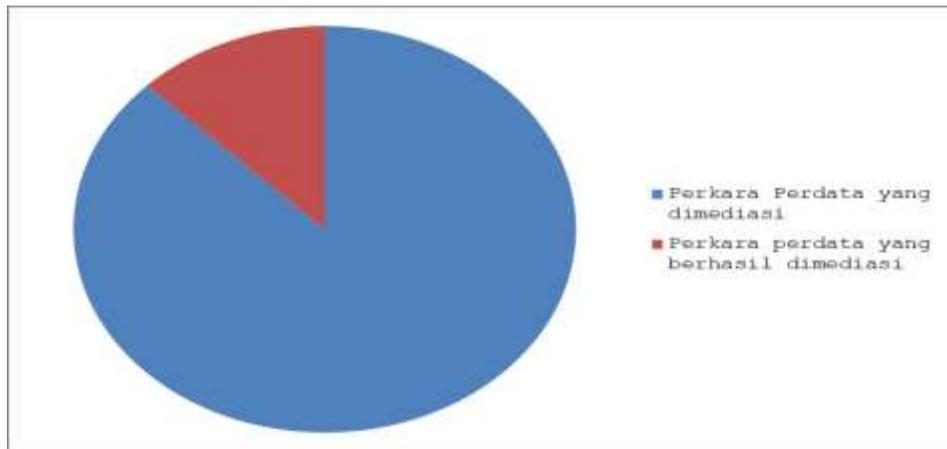


4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Rembang adalah sebagai berikut :

PERKARA PERDATA	Jumlah Perkara Perdata yang dimediasi	Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi
Gugatan	21	3

Grafik perkara perdata yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai berikut :

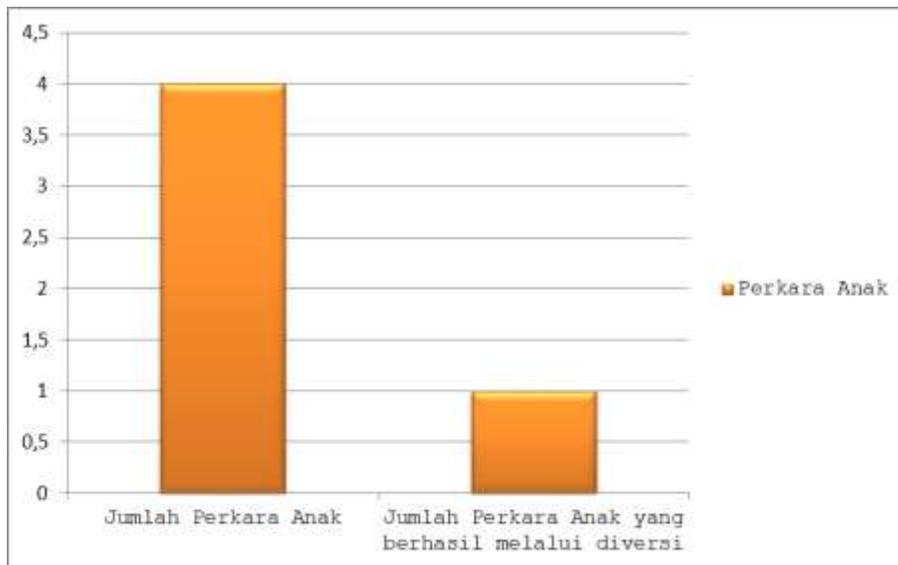


5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Rembang adalah sebagai berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Anak yang Masuk	Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi
Perkara Anak	4	1

Grafik perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai berikut :



C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Posbakum

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di

Pengadilan maka pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Rembang memperoleh dana pelayanan Posbakum dalam DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum. Adapun pelaksanaan pelayanan bantuan hukum tersebut yaitu dengan melalui proses Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi yang terpilih. Petugas Posbakum harus berada di tempat dan siap sedia manakala ada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan konsultasi mengenai permasalahan hukum. Adapun dana yang tersedia dalam DIPA untuk jasa konsultasi Posbakum tahun 2022 sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari jasa konsultan dan honor pejabat pengadaan. Pelaksanaan anggaran Posbakum Tahun Anggaran 2022 di Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pengadilan Negeri Rembang dengan PBH DPC Peradi Semarang Korwil Rembang serta Surat Perjanjian Kontrak No. W12.U30/91/PL.09/1/2022 tanggal 25 Januari 2022.

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Tahun 2022 Pengadilan Negeri Rembang tidak ada kegiatan melaksanakan sidang keliling, Sidang dilakukan di Ruang sidang di Pengadilan Negeri Rembang.

3. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Tahun 2022 Pengadilan Negeri Rembang tidak ada perkara yang didaftarkan secara prodeo, baik prodeo DIPA maupun prodeo murni.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Sumber Daya Manusia berdasarkan kepangkatan / golongan / pendidikan

Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Rembang Kelas II pada tahun 2022 berjumlah 36 orang yang terdiri dari tenaga teknis dan non teknis serta tenaga honorer. Pada bulan Juni tahun 2022 terjadi peralihan kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rembang yaitu dari Bapak Anteng Supriyo, S.H.,M.H. ke Bapak Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H.,M.H. Pengadilan Negeri Rembang Kelas II juga terjadi rotasi dan mutasi pada Aparatur Sipil Negara.

Pada tahun 2022, masih adanya pandemi covid-19 tidak menyurutkan tekad para Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Rembang untuk mengikuti diklat maupun pelatihan yang diselenggarakan secara online oleh Pusdiklat.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting bagi Pengadilan Negeri Rembang. Untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin dinamis, Pengadilan Negeri Rembang terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi pegawainya agar mampu bersaing untuk menciptakan manajemen aparatur yang profesional. Pengadilan Negeri Rembang telah melakukan upaya pembaruan guna mendukung kinerja organisasi menuju badan peradilan Indonesia yang agung.

Saat ini, pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Rembang berjumlah 27 orang yang terdiri atas 17 orang tenaga teknis yang terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Ketua
2. 1 (satu) orang Wakil Ketua
3. 3 (tiga) orang Hakim
4. 1 (satu) orang Panitera
5. 3 (tiga) orang Panitera Muda (Pidana, Perdata dan Hukum)

6. 6 (enam) orang Panitera Pengganti

7. 1 (satu) orang Jurusita

8. 1 (satu) orang Jurusita Pengganti

dan 10 orang tenaga non teknis yang terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Sekretaris

2. 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Umum dan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)

3. 1 (satu) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN

4. 3 (tiga) orang Pelaksana

5. 2 (dua) orang CPNS

Jumlah sumber daya manusia yang ada tersebut, dibantu oleh 9 (sembilan) tenaga honorer yang terdiri dari :

1. 6 (enam) orang pramubhakti

2. 2 (dua) orang satpam

3. 1 (satu) orang sopir

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan Jabatan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAP, SH. MH.	Ketua	IV/a
2	VENI MUSTIKA E.T.O, SH. MH.	Wakil Ketua	IV/a
3	IQBAL ALBANNA, SH. MH.	Hakim	III/d
4	ALIF YUNAN NOVIARI, SH.	Hakim	III/d
5	ARINI LAKSMI NOVIYANDARI,	Hakim	III/d

	SH.		
6	ANJAR WIRAWAN DWI SASONGKO, SH.	Panitera	III/d
7	DWI ARY WIDAGDO, SH. MM	Sekretaris	III/d
8	SIROT VIRIYANTO, SH.	Panitera Muda Perdata	III/d
9	LAKSITA ANGGRARINI, SH.	Panitera Muda Pidana	III/d
10	Hj. SUWARTI, SH. MH.	Panitera Muda Hukum	III/d
11	MURAN MEIRINA, SH.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	III/c
12	BUDY HARYANTO, SH.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	III/b
13	ARI AMBARWATI, A. Md.	Kasubbag Umum dan Keuangan	III/a
14	MOECH. JAINI ILJAS, SH.	Panitera Pengganti	III/d
15	BUDIYARTI	Panitera Pengganti	III/c
16	SUSI WIDYOWATI	Panitera Pengganti	III/c
17	MARDIANASARI NURITA W, SH.	Panitera Pengganti	III/b
18	HERRY MULYANTORO, SE. SH.	Panitera	III/b

		Pengganti	
19	ARNOLD RAY KAMBA, SH.	Panitera Pengganti	III/b
20	APRILIA DWI WULANDARI, SE.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	III/b
21	KHILYA KHUSNIA, S. IP.	Analisis SDM Aparatur	III/a
22	AMIN VITRIANUDIN	Jurusita	II/d
23	YULI PRASETYO	Jurusita Pengganti	II/c
24	SAIDATUN NI'MAH, SH.	Analisis perkara peradilan	III/a
25	FANMA AFIATI, A. Md.	Pengelola Keuangan	II/c
26	PRADIKTA ANDI ALVAT, SH.	Analisis Perkara Peradilan	III/a
27	SRI HERTATI SILABAN, A. Md.	Pengelola Perkara	II/c

Untuk tingkat kepangkatan/golongan seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Rembang adalah sebagai berikut :

- Golongan I**
- a. : - orang.
 - b. : - orang.
 - c. : - orang.
 - d. : - orang.
- Golongan II**
- a. : - orang.
 - b. : - orang.
 - c. : 3 orang.
 - d. : - orang.
- Golongan III**
- a. : 5 orang.

	b.	:	5	orang.
	c.	:	4	orang.
	d.	:	8	orang.
Golongan IV	a.	:	2	orang.
	b.	:	-	orang.
	c.	:	-	orang.
	d.	:	-	orang.
	e.	:	-	orang.
<hr/>				
Jumlah	:		27	orang

Untuk tingkat pendidikan seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Rembang sebagai berikut :

Tingkat S D	:	-	orang.
Tingkat S L T P	:	-	orang.
Tingkat S L T A	:	4	orang.
Tingkat Sarjana Muda	:	3	orang.
Tingkat Sarjana	:	15	orang.
Magister	:	5	orang.
<hr/>			
Jumlah	:	27	orang.

1. Mutasi

Daftar Pegawai yang mutasi, baik yang pindah dari Pengadilan Negeri Rembang maupun yang masuk ke Pengadilan Negeri Rembang pada tahun 2022 :

No.	Nama Pegawai	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Muhamad Baginda Rajoko Harahap, SH. MH.	Ketua Pengadilan Negeri Praya	Ketua Pengadilan Negeri Rembang
2.	Anteng Supriyo, SH. M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Rembang	Wakil Ketua Pengadilan Negeri

			Wonosobo
3.	Silfi Yanti Zulfia, SH, MH.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang	Ketua Pengadilan Negeri Amuntai
4.	Veni Mustika E.T.O, SH. MH.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang
5.	Eri Sutanto, SH.	Hakim Pengadilan Negeri Rembang	Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung
6.	Sri Rahayuningsih, SH.MH.	Hakim Pengadilan Negeri Rembang	Hakim Pengadilan Negeri Klaten
7.	Puryanto, SH.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rembang	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jepara

2. Promosi

Daftar Pegawai yang memperoleh promosi jabatan pada Pengadilan Negeri Rembang tahun 2022 :

No.	Nama Pegawai	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Yuli Prasetyo	Pengadministrasi Registrasi Perkara Pengadilan Negeri Rembang	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang
2.	Hj. Suwarti, SH. MH.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rembang	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Rembang

3. Pensiun

Daftar Pegawai Pengadilan Negeri Rembang yang pensiun pada tahun 2022 :

No.	Nama Pegawai	Jabatan	TMT Pensiun
1.	Indroharto Kamu	Jurusita Pengganti	01 Agustus 2022

4. Diklat (Teknis/Non Teknis)

Daftar Pegawai Pengadilan Negeri Rembang yang mengikuti diklat (teknis/non teknis) pada tahun 2022 :

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Diklat
1.	Dwi Ary Widagdo, SH. MM.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">- Champion Meeting-Court Excellence Training- Bimtek Penyusunan LK UAKPA Triwulan III Tahun 2022 dan Refreshment Cash Management System dan Pemberian Penghargaan- Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Kepegawaian pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang
2.	Aprilia Dwi Wulandari, SE.	Analisis Pengelolaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none">- Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan

		APBN	Tahun 2021 - Diklat E-Learning Implementasi RSPP Angkatan I - Bimtek Penyusunan LK UAKPA Triwulan III Tahun 2022 dan Refreshment Cash Management System dan Pemberian Penghargaan
3.	Saidatun Ni'mah, SH.	Analisis perkara peradilan	Latsar CPNS Distance Learning Gelombang II Golongan III Angkatan I s.d XIV Tahun 2022
4.	Khilya Khusnia, S.IP.	Analisis SDM Aparatur	- Microlearning PPL - Bimtek Penyusunan LK UAKPA Triwulan III Tahun 2022 dan Refreshment Cash Management System dan Pemberian Penghargaan
5.	Fanma Afiati, A. Md.	Pengelola Keuangan	Latsar CPNS Distance Learning Gelombang II Golongan II Angkatan I s.d XIV Tahun 2022
6.	Anjar Wirawan D.S, SH.	Panitera	- Pelatihan singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia

			<p>Gelombang I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan singkat identifikasi dan penomoran perkara Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Bagi Ketua Pengadilan, Panitera dan Petugas Administrasi Pengadilan Seluruh Indonesia
7.	Budyarti	Panitera Pengganti	<p>Pelatihan singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang I</p>
8.	Arnold Ray Kamba, SH.	Panitera Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang I - Pelatihan singkat identifikasi dan penomoran perkara Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Bagi Ketua

			Pengadilan, dan Administrasi Pengadilan Indonesia	Panitera Petugas Seluruh
9.	Laksita Anggrarini, SH.	Panitera Muda Hukum	Pelatihan singkat Pengganti Peradilan Indonesia	Panitera (empat) Seluruh Gelombang III
10.	Mardianasari Nurita W, SH.	Panitera Pengganti	Pelatihan singkat Pengganti Peradilan Indonesia	Panitera (empat) Seluruh Gelombang III
11.	Herry Mulyantoro, SE. SH.	Panitera Pengganti	Pelatihan singkat Pengganti Peradilan Indonesia	Panitera (empat) Seluruh Gelombang III
12.	Amin Vitrianudin.	Jurusita	Bintek Kemampuan Teknis Wilayah Pengadilan Semarang	Peningkatan Tenaga Kepaniteraan Hukum Tinggi
13.	Veni Mustika E.T.O, SH. MH.	Wakil Ketua	Pelatihan Teknis Gugatan Sederhana bagi Hakim Peradilan Umum	Yudisial Seluruh Indonesia
14.	Alif Yunan Noviari, SH.	Hakim	Pelatihan Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XVI Tahun 2022	sertifikasi

15.	Arini Laksmi N, SH.	Hakim	Pelatihan sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia
16.	Moech Jaini Iljas, SH.	Panitera Pengganti	Pelatihan singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang IV
17.	Siroth Viriyanto, SH.	Panitera Pengganti	- Pelatihan singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang V - Pelatihan singkat identifikasi dan penomoran perkara Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Bagi Ketua Pengadilan, Panitera dan Petugas Administrasi Pengadilan Seluruh Indonesia
18.	Hj. Suwanti, SH. MH.	Panitera Pengganti	Pelatihan singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang VI
19.	Susi Widyowati.	Panitera	Pelatihan singkat Panitera

		Pengganti	Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang VI
20.	Iqbal Albanna, SH. MH.	Hakim	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan online Audit For Non-Auditor Angkatan 3 dari Tempat Tugas Tahun 2022 - Pelatihan singkat identifikasi dan penomoran perkara Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Bagi Ketua Pengadilan, Panitera dan Petugas Administrasi Pengadilan Seluruh Indonesia
21.	Sri Hertati Silaban, A. Md.	Pengelola Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Blended Learning Latsar CPNS Gelombang II Golongan II dan III Angkatan V MA RI Tahun 2022 - Kegiatan Tahap III dan Permohonan pembahas (Mentor) Seminar Aktualisasi Pelatihan Dasar Learning Latsar CPNS Golongan II dan III Angkatan I-IV MA RI

			<p>Pelatihan singkat identifikasi dan penomoran perkara Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Bagi Ketua Pengadilan, Panitera dan Petugas Administrasi Pengadilan Seluruh Indonesia</p>
22.	Muhamad Baginda Rajoko Harahap, SH. MH.	Ketua	<p>- Pelatihan singkat penghapusan diskriminasi gender terhadap perempuan dan meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan bagi Hakim Tingkat Pertama seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022</p> <p>- Pelatihan singkat identifikasi dan penomoran perkara Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Bagi Ketua Pengadilan, Panitera dan</p>

			Petugas Administrasi Pengadilan Seluruh Indonesia
23.	Pradikta Andi Alvat, SH.	Analisis Perkara Peradilan	Kegiatan Tahap III dan Permohonan pembahas (Mentor) Seminar Aktualisasi Pelatihan Dasar Learning Latsar CPNS Golongan II dan III Angkatan I-IV MA RI
24.	Budy haryanto, SH.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Kepegawaian pada Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

DIPA 01

1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
	Pagu Anggaran	Rp. 4.530.798.000,00
	Realisasi Anggaran	Rp. 4.413.542.115,00

2	Pengadaan Sarana Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	
	Pagu Anggaran	Rp. 1.096.500.000,00
	Realisasi Anggaran	Rp. 1.095.479.950,00

DIPA 03

1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
	Pagu Anggaran	Rp. 135.182.000,00
	Realisasi Anggaran	Rp. 133.580.535,00

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 01

425131	Pendapatan Sewa Rumah Dinas	Rp. 5.365.500,00
425131	Pendapatan Sewa Kantin	Rp. 925.000,00
425911	Pengembalian Pembulatan Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp. 101,00

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 03

425231	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah tangan	Rp. 30.000,00
425232	Pendapatan uang meja/leges	Rp. 230.000,00
425233	Pendapatan ongkos perkara	Rp. 4.580.000,00
425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	Rp.11.602.850,00

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2022 memiliki aset Gedung seluas 2.024 m2 yang terletak di Jalan P. Diponegoro No. 97 Rembang, Jawa Tengah.

SARANA / PRASARANA

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
7	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
8	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
9	Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
10	Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
11	Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	
12	Ruang Sidang Kartika	1	

13	Ruang Sidang Cakra	1	
14	Ruang Sidang Candra	1	
15	Ruang Sidang Anak	1	
16	Ruang Perpustakaan	1	
17	Ruang ABH	1	
18	Ruang tunggu Anak	1	
19	Ruang Arsip	1	
20	Ruang Dapur	1	
21	Ruang Sekretariat DYK	1	
22	Ruang Mediasi/Diversi/Kaukus	1	
23	Ruang Jaksa	1	
24	Ruang Laktasi /Kesehatan/Ruang Disabilitas	1	
25	Ruang Server	1	
26	Ruang Posbakum	1	
27	Ruang PTSP	1	
28	Ruang Lobi	1	
29	Ruang Penerima Tamu/Piket	1	
30	Ruang Tamu Terbuka	1	
31	Ruang Merokok	1	
32	Ruang Tunggu Pengunjung Sidang	1	
33	Ruang Tahanan Wanita	1	
34	Ruang Tahanan Laki-laki	1	
35	Ruang Gudang	1	
36	Mushalla	1	
37	Ruang Satpam	1	
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Meja Rapat	1	buah
2	Meja Komputer	6	buah
3	Meja Telepon	2	buah
4	Meja Resepsionis	2	buah
5	Meja kerja	85	buah

6	Kursi kayu	54	buah
7	Kursi besi	104	buah
8	Almari kayu	44	buah
9	Buffet	11	buah
10	Kardex kayu	1	buah
11	Fill Cabinet kayu	1	buah
12	Fill Cabinet besi	4	buah
13	Sice	12	buah
14	Kipas angin	7	buah
15	Tape Recorder	1	buah
16	Paging mic	5	buah
17	Partisi	3	buah
18	Lambang Garuda	3	buah
19	Tiang bendera	8	buah
20	Pesawat telepon	3	buah
21	Intercom unit	1	buah
22	Facsimile	3	buah
23	AC Split	38	buah
24	AC Portable	2	buah
25	Papan visual	15	buah
26	White board	4	buah
27	Palu sidang	5	buah
28	PC Unit	43	buah
29	Bangku panjang kayu	38	buah
30	Bangku panjang besi	25	buah
31	Rak kayu	8	buah
32	Rak besi	7	buah

33	Microphone	6	buah
34	Peti uang/cash box	1	buah
35	Brankas	1	buah
36	Televisi	2	buah
37	Amplifier	1	buah
38	Equaliser	1	buah
39	Lound speaker	3	buah
40	Alat musik/organ	1	buah
41	Laptop	27	buah
42	Printer	24	buah
43	Scanner	5	buah
44	Vacum cleaner	3	buah
45	Mesin absensi	1	buah
46	Intercom/pabx	2	unit
47	Alat perekam suara	3	buah
48	Faxsimile	3	buah
49	Sound system	3	unit
50	CCTV	4	unit
51	LED Running teks	1	buah
52	Hardisk Eksternal	3	buah
53	Genset	2	buah

KENDARAAN DINAS

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Station Wagon Toyota Kijang Inova (K 44	2004			√	Kendaraan Dinas Jabatan Panitera

	D)					
2.	Station Wagon Toyota Avanza (B 2686 UQ)	2007		√		Kendaraan Dinas Operasional
3.	Station Wagon Toyota Kijang Inova (K 9500 ZD)	2012		√		Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris
4.	Toyota Kijang Innova Venturer (K 5 D)	2021	√			Kendaraan Dinas Jabatan Ketua, Pinjam Pakai Pembang Rembang
5.	Toyota Altis (K 9503 HD)	2021		√		Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Ketua, Pinjam Pakai Pembang Rembang
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
	Sepeda Motor					
1	Honda NF125D	2004		√		Milik Mahkamah Agung RI
2	Honda NF125D	2004		√		Milik Mahkamah Agung RI
3	Honda NF125SD	2006		√		Milik Mahkamah Agung RI
4	Honda	2006		√		Milik

	NF125SD					Mahkamah Agung RI
5	Honda NF125NF	2007		√		Milik Mahkamah Agung RI
6	Honda Revo	2008		√		Milik Mahkamah Agung RI

RUMAH DINAS

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1		√		Milik Mahkamah Agung RI
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			Milik Mahkamah Agung RI
3.	Rumah Dinas Hakim	3		√		Milik Mahkamah Agung RI
4.	Rumah Dinas Panitera	1		√		Milik Mahkamah Agung RI
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1		√		Milik Mahkamah Agung RI

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi e-court

Pengadilan Negeri Rembang telah melaksanakan apa yang menjadi program Mahkamah Agung untuk mensukseskan program e-Court. Sejak di launching di Balikpapan tanggal 13 Juli 2018,

Pengadilan Negeri Rembang berupaya mensosialisasikan e-Court dan e-Litigasi kepada unsur internal pengadilan dan unsur eksternal kepada masyarakat baik kepada para advokat, masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga berkepentingan seperti perbankan dan akademik. Hal ini terlihat dengan perkembangan kenaikan pendaftaran perkara melalui elektronik e-Court dan dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik atau e-Litigasi.

Mahkamah Agung sebagai instansi yudisial senantiasa berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan adanya E-Court, yaitu pendaftaran perkara, dan bahkan sampai ke proses persidangan secara online. Dimana dari penggunaan E-Court tersebut diharapkan proses persidangan yang selama ini dianggap mahal, tidak efisien serta menghabiskan waktu. Pengadilan Negeri Rembang sebagai pengadilan tingkat pertama juga senantiasa mendukung program Mahkamah Agung dengan mendorong para pihak untuk mendaftar perkara secara online melalui e-Court. Selama tahun 2022, perkara yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Rembang melalui e-Court sejumlah 126 perkara, 22 perkara Gugatan, 97 perkara Permohonan dan 7 perkara Gugatan Sederhana.

2. Implementasi SIPP

Sebagai badan peradilan yang Agung di era teknologi informasi ini, Mahkamah Agung selalu memiliki inovasi, khususnya dalam hal pencatatan perkara dan pelaporan secara online. Pencatatan dan pelaporan perkara secara manual dirasa terlalu lama, tidak efektif dan efisien, oleh karena itu diciptakanlah sebuah sistem elektronik dalam pencatatan perkara di pengadilan tingkat pertama yang kemudian dilakukan sinkronisasi ke Mahkamah Agung sebagai bentuk pelaporan secara digital. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang databasenya tersimpan di masing-masing satuan kerja, Pengadilan tingkat Banding dan Mahkamah Agung membuat sistem pencatatan perkara lebih aman, karena tidak hanya disimpan dalam 1 tempat. Demikian pula, untuk para pihak yang berperkara pun lebih mudah untuk mengakses proses penyelesaian perkaranya, karena SIPP juga harus diupload di website masing-masing

Pengadilan. Untuk Pengadilan Negeri Rembang, aplikasi SIPP web dapat diakses pada **<http://sipp.pn-rembang.go.id>**.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Rembang Kelas II telah terakreditasi yang ditandai dengan diterimanya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung di Mataram dengan Nomor : TAPM.030/QMR/SERTIFIKAT/10/2016 dengan Terakreditasi A (excellent) dan telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2015 yang dikeluarkan oleh ICSM (*International Certification Services Management*) dan akan dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun. Audit Surveillance untuk Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Rembang pada:

- a) April 2017
- b) Oktober 2017
- c) April 2018
- d) Oktober 2018
- e) April 2019
- f) Oktober 2019
- g) Januari 2020
- h) Nopember 2020
- i) Desember 2020
- j) September 2021
- k) Nopember 2021
- l) Agustus 2022

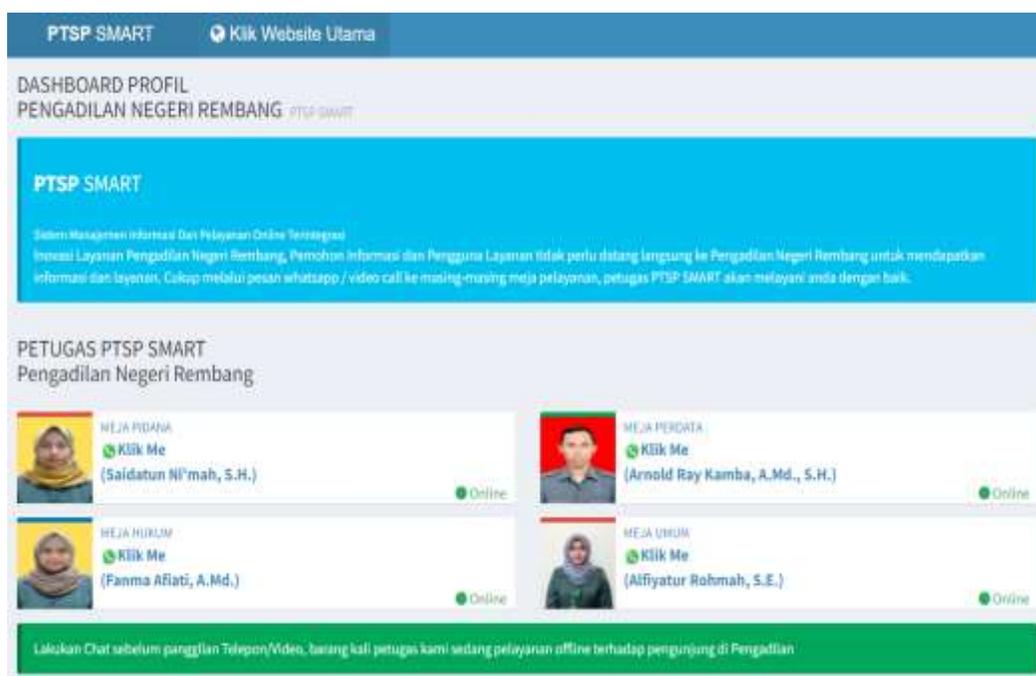
Hasil survei surveillance Badan Peradilan Umum yang dilakukan pada tahun 2021 berdasarkan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan II Tahun Anggaran 2021, nilai akreditasi Pengadilan Negeri Rembang Kelas II adalah 707 dengan predikat “A”.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dilaksanakan dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan atau pengguna pengadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau yang berorientasi pada kepercayaan dan kepuasan pengguna (*customer focus*), serta meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik (*public trust and confidence*).

Dalam meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Rembang Kelas II tahun 2021 membuat Inovasi dengan nama PTSP SMART dan sampai sekarang masih bisa digunakan. PTSP SMART adalah sistem manajemen informasi dan pelayanan online terintegrasi. Inovasi layanan Pengadilan Negeri Rembang, Pemohon informasi dan Pengguna layanan tidak perlu datang langsung ke Pengadilan Negeri Rembang untuk mendapatkan informasi dan layanan, cukup melalui pesan whatsapp/video call ke masing-masing meja pelayanan, petugas PTSP SMART akan melayani dengan baik. Pemohon informasi/Pengguna layanan dapat mengakses PTSP SMART melalui <https://pn-rembang.go.id/ptpsmart>.

Layanan PTSP SMART



The screenshot displays the PTSP SMART dashboard for the Pengadilan Negeri Rembang. At the top, there is a navigation bar with 'PTSP SMART' and a 'Klik Website Utama' button. Below this is a 'DASHBOARD PROFIL' section for 'PENGADILAN NEGERI REMBANG'. A prominent blue banner titled 'PTSP SMART' describes it as an integrated online service system. The main content area, 'PETUGAS PTSP SMART', lists four staff members with their photos, names, titles, and 'Klik Me' buttons. All staff are shown as 'Online'. At the bottom, a green bar provides a notice: 'Lakukan Chat sebelum panggilan Telepon/Video, barang kali petugas kami sedang pelayanan offline terhadap pengunjung di Pengadilan'.

Meja	Nama	Jabatan	Status
MEJA PERDATA	MEJA PERDATA	(Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H.)	Online
MEJA PERDATA	MEJA PERDATA	(Saidatun Ni'mah, S.H.)	Online
MEJA UMUM	MEJA UMUM	(Alfiyatur Rohmah, S.E.)	Online
MEJA UMUM	MEJA UMUM	(Fanma Afiati, A.Md.)	Online

C. Inovasi Pelayanan Publik

Tahun 2021 Pengadilan Negeri Rembang telah membuat inovasi layanan publik yang merupakan ide gagasan original yang dapat dilihat dari beberapa jejak digital di internet dan sampai sekarang masih bisa digunakan. Inovasi Pengadilan Negeri Rembang ini adalah Mext SIPP dan Layanan PTSP SMART. Berikut deskripsi inovasi Pengadilan Negeri Rembang :

a. MExt SIPP

MExt SIPP adalah aplikasi pendukung dari aplikasi SIPP dan ditujukan khusus untuk para pihak yang sedang terlibat langsung dalam perkara di Pengadilan Negeri, yakni Jaksa, Pengacara dan Para Pihak dalam perkara untuk melihat dan memantau data perkaranya seperti riwayat perkara, status penetapan, list jadwal sidang dan data putusan. Aplikasi ini juga bisa digunakan oleh masyarakat umum untuk memantau jadwal sidang, tilang, mengecek biaya radius perkara, kalkulator biaya panjar dan fitur-fitur lainnya.

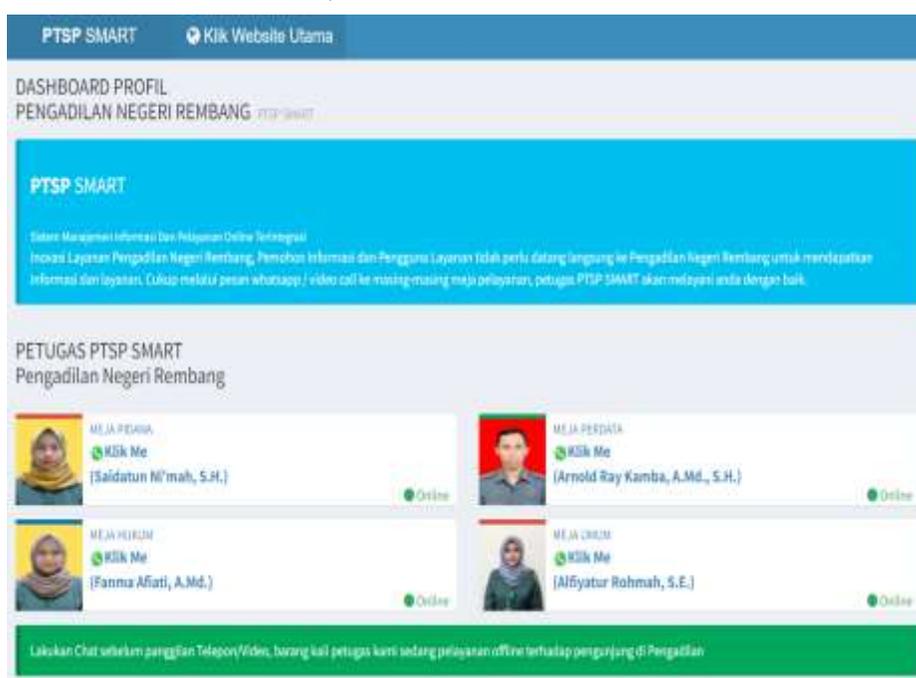




b. PTSP SMART

PTSP SMART adalah sistem manajemen informasi dan pelayanan online terintegrasi. Inovasi layanan Pengadilan Negeri Rembang, Pemohon informasi dan Pengguna layanan tidak perlu datang langsung ke Pengadilan Negeri Rembang untuk mendapatkan informasi dan layanan, cukup melalui pesan whatsapp/video call ke masing-masing meja pelayanan, petugas PTSP SMART akan melayani dengan baik. Pemohon informasi/Pengguna layanan dapat mengakses PTSP SMART melalui <https://pn-rembang/ptspsmart>.

Layanan PTSP SMART



BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Guna mengetahui pelaksanaan kinerja mulai dari Pejabat Fungsional, Para Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jusrita/Jusrita Pengganti serta pejabat kesekretariatan sampai dengan staf perlu di lakukan fungsi pengawasan yang sifatnya tetap dan terus menerus.

Ada beberapa bentuk pengawasan yang selama ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Rembang Kelas II yaitu :

1) Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

Penunjukan Hakim Pengawas Bidang oleh Ketua Pengadilan Negeri ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan yang berlaku selama 1 (satu) tahun atau selama Hakim yang ditunjuk tersebut bertugas di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II. Ada beberapa Hakim Pengawas bidang yaitu :

- a) Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata
- b) Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana
- c) Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum
- d) Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan
- e) Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
- f) Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Pengawasan internal ditekankan pula kepada Pejabat Struktural agar menjadi tauladan bagi stafnya sehingga pengawasan melekat dapat berjalan dengan baik terus menerus dan diakhir tahun dapat memberikan nilai terhadap pelaksana SKP. Pengawasan internal yang

lainnya adalah adanya briefing tiap bulan atau briefing kondisional dan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan baru yang sifatnya perlu ditindak lanjuti.

2) Rapat Pembinaan Rutin

Ketua Pengadilan Negeri Rembang sebagai bentuk pengawasan pimpinan secara rutin setiap bulan selalu melakukan pengawasan dan monitoring dalam bentuk rapat pembinaan setiap bulan. Dalam rapat pembinaan ini tidak hanya melaporkan notulen bulan sebelumnya, tetapi juga evaluasi terhadap kinerja para pegawai di Pengadilan Negeri Rembang baik itu kinerja yang menyangkut teknis maupun non teknis. Dalam bidang teknis, Ketua Pengadilan selalu menyampaikan agar tertib administrasi SIPP, karena kinerja inilah yang dipantau secara langsung oleh Badan Peradilan Umum maupun Mahkamah Agung.

B. Evaluasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap bagian telah dilaksanakan sesuai dengan *job description* diperlukan adanya evaluasi apabila sudah dilaksanakan dengan baik dan benar dan hasil yang diperoleh dapat maksimal. Tahun 2022 Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 02 Agustus 2022 telah dilakukan Assesmen Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Tim Assesmen Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Bapak Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H.,M.H.

Tahun 2021 Pengadilan Negeri Rembang telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan termasuk dalam Usul Satuan Kerja/Pengadilan untuk meraih predikat WBK. Akan tetapi Pembangunan Zona Integritas yang sudah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh belum membuahkan hasil dan menerima predikat WBK dari Kemenpan RB.

Nilai positif yang diambil adalah walaupun Pengadilan Negeri Rembang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM dari Kemenpan RB, akan tetapi semangat untuk meraih predikat WBK/WBBM terus menyala dan tidak mempengaruhi kinerja. Hal ini dibuktikan dengan capaian-

capaian yang diraih oleh Pengadilan Negeri Rembang dalam hal meraih berbagai prestasi dan penghargaan di tahun 2022 yaitu :

- a. Satuan Kerja Terbaik II Akurasi Perencanaan pada Halaman III DIPA Tahun Anggaran 2021



- b. Satker Terbaik I Implementasi Penggunaan Digipay marketplace Dalam Pelaksanaan APBN Periode Triwulan I Tahun 2022



- c. Satker Terbaik I Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Dalam Pelaksanaan APBN Periode Triwulan I Tahun 2022



- d. Satker Terbaik I Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Dalam Pelaksanaan APBN Periode Triwulan II Tahun 2022



- e. Satker Terbaik I Implementasi Penggunaan Digipay marketplace Dalam Pelaksanaan APBN Periode Triwulan II Tahun 2022



- f. Satker Terbaik II Implementasi Penggunaan Digipay marketplace Dalam Pelaksanaan APBN Periode Triwulan III Tahun 2022



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Negeri Rembang Kelas II merupakan salah satu badan peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum, diharapkan meningkatkan kinerja dan pelayanan publiknya.

Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah diakomodasi dalam Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Rembang Kelas II telah berhasil mempertahankan Akreditasi Penjaminan Mutu Dirjen Badan Peradilan Umum dengan kualifikasi A (Excellent).

Dalam kerangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Rembang Kelas II yang berbasis pada berhasilnya mempertahankan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum tersebut, maka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pewujudan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dilaksanakan dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan atau pengguna pengadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau yang berorientasi pada kepercayaan dan kepuasan pengguna (*customer focus*), serta meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik (*public trust and confidence*).

Pengadilan Negeri Rembang membuat sebuah terobosan pelayanan publik dengan membuat Inovasi MExt SIPP dan Layanan Publik PTSP SMART dimana masyarakat umum bisa memantau jadwal sidang, tilang,

mengecek biaya radius perkara, kalkulator biaya panjar dan fitur-fitur lainnya dan masyarakat juga dapat melakukan layanan di Pengadilan Negeri Rembang dengan cara melakukan Panggilan atau Pesan Whatsapp yang akan di terima oleh petugas PTSP pada jam kerja.

Komitmen bersama segenap aparat peradilan dalam pelaksanaan PTSP pada Pengadilan Negeri Rembang tersebut merupakan tekad aktifnya mendukung upaya terencana, terstruktur, terukur dan berkelanjutan dalam kerangka peningkatan pelayanan publik yang sinergis dan harmonis dengan Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024.

Ekspektasi pelaksanaan PTSP berikut inovasi digitalnya berbasis teknologi informasi, dan pemeliharaan Akreditasi Penjaminan Mutu menuju Peradilan Modern yang diimplementasikan dalam bingkai Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan peningkatan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Rembang tersebut adalah seiring dengan upaya pewujudan dan konkretisasi pembangunan Zona Integritas (ZI) guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM) dalam ikhtiar bersama mencapai Visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Rembang Yang Agung”** yang sinergis dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu bersama demi **“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”**.

B. Rekomendasi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) maupun peningkatan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Rembang tersebut akan dapat dicapai sesuai ekspektasi demi visi **“terwujudnya Pengadilan Negeri Rembang Yang Agung”** sangat tergantung pada pemahaman dan implementasi konkret pola pikir (*mindset*) dan pola budaya kinerja pelayanan (*culture-set*) oleh segenap aparat peradilan pada Pengadilan Negeri Rembang yang berbasis pada motto pelayanan publik **“SMART”** (Sinergi, Mandiri, Akuntabel, Responsif, Transparan) yang didukung dan terintegrasi dengan pola sikap keteladanan dari segenap pimpinan, para Hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, aparat staf pelaksana dan tenaga pramubakti/honorar pada Pengadilan Negeri Rembang di bawah

pembinaan dan pengawasan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Semarang selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Rembang yang belum mendapatkan WBK/WBBM supaya menjadi motivasi utama dalam meraih predikat WBK/WBBM dari Kemenpan RB di masa mendatang, dan menjadi bahan evaluasi apa yang menjadi kekurangan sehingga kedepan dapat diperbaiki dan target mendapatkan predikat WBK/WBBM tercapai sesuai harapan yang diinginkan Pengadilan Negeri Rembang.